RUU TENTANG IBUKOTA NEGARA

AKD: RUU TENTANG IBUKOTA NEGARA

Bulan: Juli 2020

Oleh: RUU TENTANG IBUKOTA NEGARA

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

Upaya pemindahan ibu kota Indonesia dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, kota Palangka Raya sempat menjadi kandidat kuat sebagai lokasi ibukota baru.

Usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak kepresidenan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY mendukung ide untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta.

Menurut Presiden Joko Widodo, alasan wilayah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara dijadikan lokasi ibu kota baru adalah kecilnya risiko bencana alam di wilayah itu, lokasi yang "ada di tengah-tengah Indonesia", lokasi di dekat kota Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang, "infrastruktur yang relatif lengkap", dan adanya 180 hektare tanah yang telah dikuasai pemerintah.

Dalam pengumuman 26 Agustus 2019, Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan segera merancang undang-undang untuk pemindahan ibu kota untuk disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunan akan dimulai pada 2020, dan pemindahan akan dilakukan bertahap dimulai dari 2024. Kemudian, Pemimpin Ibukota Baru tidak dipimpin seorang Gubernur, melainkan Kepala Badan Otorita Ibukota Indonesia yang mirip jabatannya setingkat Menteri, dan Badan Otorita pun akan dibantu oleh Manager-Kepegawaian mengawasi Pemerintahan Ibukota Baru nantinya.

Pemerintah, melalui Kementerian PUPR, menyelenggarakan sayembara gagasan desain kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tingkat nasional dari bulan Oktober hingga Desember 2019 berhadiah total 5 miliar rupiah. Dewan juri yang terdiri dari 13 orang disiapkan untuk memilih pemenang sayembara tersebut, dengan Imam Santoso Ernawi selaku Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN sebagai kepala dewan juri.

Sayembara tersebut menetapkan tiga kriteria umum yang harus dipenuhi usulan desain ibukota baru, yaitu desain harus mencerminkan identitas bangsa; desain harus menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi; serta mencerminkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional.

Saat pendaftaran ditutup, terdapat total 762 usulan tajuk dari para peserta sayembara, 12 usulan di antaranya berasal dari peserta luar negeri.

Pemenang sayembara desain ibu kota negara yang diumumkan pada 23 Desember 2019 menyatakan desain bertajuk Nagara Rimba Nusa sebagai pemenang utama sayembara tersebut. Desain lainnya yang bertajuk "The Infinite City" dinyatakan sebagai juara kedua, dan "Seribu Galur" sebagai juara ketiga. Selain itu, desain bertajuk "Zamrud Khatulistiwa" dan "Banua Rakyat Nusantara" juga menjadi pemenang harapan pertama dan kedua.

Pada Mei 2020, Bappenas menyatakan bahwa kegiatan pemindahan ibukota negara akan tetap dilanjutkan, walaupun sebagian anggaran harus dialihkan untuk penanggulangan pandemi koronavirus di Indonesia. Kegiatan tersebut akan difokuskan terhadap kegiatan pengkajian dan persiapan sebelum pembangunan fisik dikerjakan, walaupun pembangunan wahana penunjang yang telah dimulai sebelum 2020 akan tetap dilanjutkan.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani serta dosen Universitas Trisakti Yayat Supriatna menyebutkan perlunya disahkan undang-undang agar keputusan pemerintahan Joko Widodo menjadi mengikat dan tidak diubah oleh presiden selanjutnya. Pada saat ini, posisi Jakarta sebagai ibu kota didasarkan pada UU 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

Sultan Adji Muhammad Arifin, pemimpin Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, merasa bersyukur dengan pemindahan ibu kota negara dikarenakan wilayah tersebut merupakan tempat berdirinya Kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan dengan bukti sejarah tertua di Indonesia.

Ekonom senior, Emil Salim mempertanyakan proses pemindahan ibu kota dari Jakarta yang dianggap justru akan meninggalkan masalah banjir dan macet yang semestinya dapat diselesaikan dengan solusi konkret tanpa memerlukan pemindahan besar-besaran yang membutuhkan banyak dana.

Kelompok pemerhati lingkungan Greenpeace Indonesia mengkritisi rencana pemindahan Ibu kota ke Kalimantan yang dapat mengancam kelestarian hutan hujan Kalimantan sebagai "paru-paru dunia" dan ekosistem langka, termasuk spesies

Orangutan.Resiko kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan sebagai dampak kerusakan alam di wilayah Ibu kota baru juga menjadi pertimbangan serius bagi pemerhati lingkungan.

Partai Gerindra juga memberi respon negatif atas urgensi dari rencana pemindahan Ibu kota ke Kalimantan Timur sebagai sebuah "pemborosan" semata demi pencitraan politik dan menambah beban negara kepada swasta dan asing. Politisi PKS Mardani Ali Sera mempermasalahkan rencana keterlibatan pihak asing dalam pengarahan proses pembentukan ibu kota baru, dengan berpendapat bahwa kemampuan para ahli dalam negeri sudah cukup untuk membangun ibu kota negaranya sendiri. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkritisi penyediaan luas wilayah untuk Ibu kota baru yang dinilai boros lahan.Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Kedai KOPI pada Agustus 2019, 95,7% responden dari Jakarta menyatakan penolakannya terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Sumber Kutipan:

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemindahan_ibu_kota_Indonesia_(2019%E2%80%93sekarang)#:~:text=Melalui%20rapat%20terbatas%

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Boyman Harun Minta Transparansi Progres dan Evaluasi Pembangunan IKN	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44861/t/Boyman%20Harun%20Minta%20Transparansi%20Progres%20dan%20Evaluasi%20Pembangunan%20IKN
Berita	DPR Setujui RUU IKN jadi UU	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU
Berita	Irwan Dorong Akselerasi Pembangunan di Kutai Timur	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36644/t/Irwan+Dorong+Akselerasi+Pembangunan+di+Kutai+Timur
Berita	Kesiapan SDM di Kaltim jadi Kunci Tata Kelola IKN	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36927/t/Kesiapan+SDM+di+Kaltim+jadi+Kunci+Tata+Kelola+IKN
Berita	Legislator Dorong Pembangunan Konektifitas Transportasi IKN	http://dpr.go.id/berita/detail/id/29101/t/Legislator+Dorong+Pembangunan+Konektifitas+Transportasi+IKN
Berita	Momentum Hari Jalan Nasional, Komisi V Tinjau Infrastruktur Kutai Timur	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36627/t/Momentum+Hari+Jalan+Nasional%2C+Komisi+V+Tinjau+Infrastruktur+Kutai+Timur
Berita	Pansus RUU IKN Soroti Sejumlah Hal Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36917/t/Pansus+RUU+IKN+Soroti+Sejumlah+Hal+Terkait+Pemindahan+Ibu+Kota+Negara
Berita	Pembangunan IKN akan Bersinergi dengan Masyarakat Kaltim	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36910/t/Pembangunan+IKN+akan+Bersinergi+dengan+Masyarakat+Kaltim
Berita	Pemindahan IKN akan Dorong Transformasi Ekonomi di Kaltim	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36911/t/Pemindahan+IKN+akan+Dorong+Transformasi+Ekonomi+di+Kaltim
Berita	Penyangga IKN, Pembangunan Infrastruktur Kaltim Perlu Diperhatikan	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36674/t/Penyangga+IKN%2C+Pembangunan+Infrastruktur+Kaltim+Perlu+Diperhatikan
Berita	Slamet: Konsep IKN ‘City in The Forest’ Ancam Keanekaragaman Hayati di Kalimantan	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36918/t/Slamet%3A+Konsep+IKN+%E2%80%98City+in+The+Forest%E2%80%99+Ancam+Keanekaragaman+Hayati+di+Kalimantan
Berita	Suryadi Jaya: Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan ‘Overbudget’	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36919/t/Suryadi+Jaya%3A+Proyek+Pembangunan+IKN+Berpotensi+Mangkrak+dan+%E2%80%98Overbudget%E2%80%99
Infografis	Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/infografis/infografis-public-23.pdf
Jurnal	Analisa Pemindahan Ibukota Negara	http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3989/3837
Jurnal	Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya	http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/45/34
Jurnal	Analisis Sentimen Keputusan Pemindahan Ibukota Negara Menggunakan Klasifikasi Naive Bayes	https://ejurnal.dipanegara.ac.id/index.php/sensitif/article/view/312/276

Jurnal	Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara Baru	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/parliamentary_review/Pa \nrliamentary%20Review-II-2-J-20 \n20.pdf
Jurnal	Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-XI-16-II-P3DI-Agustus-201 \n9-227.pdf?1592195940
Jurnal	Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya	http://jayapanguspress.penerbi \nt.org/index.php/ganaya/article \n/view/367/356
Jurnal	Dampak Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia terhadap Dinamika Perekonomian Di Palangka Raya	http://e-journal.lp2m.uinjambi \n.ac.id/ojp/index.php/iltizam/a \nrticle/view/531/316
Jurnal	Eksistensi Bahasa Lokal Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur: Ancaman dan Strategi Pemertahanannya	http://jayapanguspress.penerbi \nt.org/index.php/ganaya/article \n/view/365/354
Jurnal	Implikasi Hukum Pertanahan terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta Ke Kalimantan Timur	http://jayapanguspress.penerbi \nt.org/index.php/ganaya/article \n/view/369/358
Jurnal	Keberlanjutan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Pada Masa Pandemi	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-XIII-7-I-P3DI-April-2021- \n176.pdf
Jurnal	Menyoal Pemindahan Ibu Kota Negara	http://research-report.umm.ac. \nid/index.php/API-BAA/article/v \niew/2973/2778
Jurnal	Model Konseptual Pemertahanan Bahasa Lokaldi Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara yang Baru	http://jayapanguspress.penerbi \nt.org/index.php/ganaya/article \n/view/368/357
Jurnal	Pemindahan Ibu Kota Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Kalimantan Timur: Strategi Pemenuhan Kebutuhan dan Konsumsi Energi	http://workingpapers.bappenas. \ngo.id/index.php/bwp/article/vi \new/53/44
Jurnal	Pemindahan Ibu Kota dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi	https://www.researchgate.net/p \nublication/324079005_Pemindaha \nn_ibu_kota_dan_potensi_konekti \nvitas_pemerataan_ekonomi
Jurnal	Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera	http://e-journal.iain-palangka \nraya.ac.id/index.php/jsam/arti \ncle/view/779/812
Jurnal	Pemindahan Ibukota Negara	https://tataruang.atrbpn.go.id \n/Bulletin/upload/data_artikel/ \nedisi5i.pdf
Jurnal	Pemindahan Ibukota Negara Indonesia, Perspektif Kebencanaan	https://osf.io/preprints/inarx \niv/6edng/
Jurnal	Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau dari Perspektif Geografi Pertahanan	http://139.255.245.6/index.php \n/JPBH/article/view/373/247
Jurnal	Strategi Pembiayaan dan Multiplier Effect Perekonomian dalam Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-XI-18-II-P3DI-September-2 \n019-216.pdf?1592195973
Jurnal	Warisan Budaya sebagai Ikon Pariwisata dalam Rangka Kalimatan Timur Menjadi Ibukota Negara	http://jayapanguspress.penerbi \nt.org/index.php/ganaya/article \n/view/372/361
Buku	Air Perkotaan dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=267 \n24&keywords=kota
Buku	Buku 5 : Udara Perkotaan dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=267 \n22&keywords=kota
Buku	Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=183 \n75&keywords=kota
Buku	Jokowi : Memimpin Kota Menyentuh Jakarta	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=279 \n34&keywords=kota

Buku	Klasifikasi Kota	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=183\n08&keywords=kota
Buku	Manajemen Kota: Perspektif Spasial	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=285\n93&keywords=kota
Buku	Membangun Kota Jakarta	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=138\n81&keywords=kota
Buku	Mengenal 33 Provinsi Indonesia: Kalimantan Timur	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=247\n67&keywords=kalimantan+timur
Buku	Penataan Ruang : Sebuah Cermin Peradaban	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=277\n45&keywords=kota
Buku	Peran DPRD dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=268\n16&keywords=kota
Buku	Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=276\n40&keywords=kota
Buku	Perencanaan Kota Komprehensif : Pengantar & Penjelasan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=154\n39&keywords=kota
Buku	Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Daerah: Studi Kasus Pola Komunikasi Pembangunan Pada Kota Palopo Sulawesi Selatan Dan Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=271\n01&keywords=kota
Buku	Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid 1	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=123\n62&keywords=kota
Buku	Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=244\n71&keywords=kota
Buku	Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=194\n46&keywords=kota
Buku	Proses Perencanaan Wilayah dan Kota	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=278\n75&keywords=kota
Buku	Sejarah Sosial Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=322\n57&keywords=kota
Buku	Sistem Informasi Terbuka Penunjang Pembangunan Berwawasan Lingkungan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=183\n72&keywords=kota
Buku	Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=268\n17&keywords=kota
Buku	Transforming Cities with Transit : Transit and Land Use Integration for Sustainable Urban Development	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=263\n45&keywords=kota
Buku	Transportasi Kota dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=268\n13&keywords=kota
Buku	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=216\n93&keywords=ibukota+negara
Buku	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=181\n09&keywords=ibukota+negara

Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024	http://jdih.bappenas.go.id/data/peraturan/Perpres_Nomor_18_tahun_2020_tentang_RPJMN_lampiran.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA	http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/608.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA	http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/200.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/26.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_29.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH	http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/34.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA	http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_34.pdf
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=20369&keywords=ibukota+negara
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2002_7.pdf
Surat kabar	Dorong Kajian Lebih Mendalam: DPR Tak Mau Undang-Undang Pemindahan Ibukota Digugat	http://kliping.dpr.go.id/index/n/detail/id/36956
Surat kabar	Dorong RUU Pemindahan Ibukota, Misbakhun: Optimalisasi Aset Tekan Biaya Pembangunan	http://kliping.dpr.go.id/index/n/detail/id/36893
Surat kabar	DPR Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara	http://kliping.dpr.go.id/index/n/detail/id/28340
Surat kabar	DPR Minta Landasan Hukum Pemindahan IKN Jadi Prioritas	http://kliping.dpr.go.id/index/n/detail/id/37789
Surat kabar	DPR Tolak Pelibatan Swasta dalam Pemindahan Ibu Kota	http://kliping.dpr.go.id/index/n/detail/id/29425
Surat kabar	DPR Tunggu Konsep Pemindahan Ibu Kota	http://kliping.dpr.go.id/index/n/detail/id/36902
Surat kabar	DPR: Pemindahan Ibu Kota Bakal Jadi Legacy Jokowi	http://kliping.dpr.go.id/index/n/detail/id/36345
Surat kabar	Dukung Keinginan Jokowi - Misbakhun: Pemindahan Ibu Kota Bisa 0 Rupiah Lho	http://kliping.dpr.go.id/index/n/detail/id/36288
Surat kabar	Dukung Pemindahan Ibu Kota, DPR Siap Buatkan Payung Hukum	http://kliping.dpr.go.id/index/n/detail/id/36331
Surat kabar	GRAFIKOTA, Calon Ibu Kota Negara Baru	https://epaper.dpr.go.id/index/n/detail/id/10858
Surat kabar	Hentikan Bicara Pemindahan Ibukota - Dinilai Tidak Realistis, Mending Urus Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi	http://kliping.dpr.go.id/index/n/detail/id/32068
Surat kabar	IBU KOTA BARU, RUU IKN Segera Dibahas DPR	https://epaper.dpr.go.id/index/n/detail/id/10693

Surat kabar	IBU KOTA BARU. Kontestasi Swasta Biayai Ibu Kota Negara Baru	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/11534
Surat kabar	IBU KOTA NEGARA BARU, MENDAMBA KOTA CANGGIH NAN RAMAH LINGKUNGAN	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10797
Surat kabar	IBU KOTA NEGARA, PUPR BELUM ALOKASIKAN DANA PEMBANGUNAN FISIK	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10838
Surat kabar	Kendaraan Autonomous di IKN Baru	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10833
Surat kabar	Menkumham: RUU Omnibus Law dan Pemindahan Ibu Kota Jadi Prioritas	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/37951
Surat kabar	Mewujudkan Transportasi Ideal di IKN	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10905
Surat kabar	Pemerintah Diminta Serius Soal Ibu Kota Negara	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/29413
Surat kabar	Pemindahan Dikonsultasikan dengan DPR	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/36265
Surat kabar	Pemindahan Ibu Kota Butuh Kesiapan Regulasi: DPR Terima Surat Kajian dari Jokowi	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/36948
Surat kabar	Pemindahan Ibu kota Diputuskan Berdasar Hasil Kajian	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/36951
Surat kabar	Pemindahan Ibu Kota Jangan Terburu-buru	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/36825
Surat kabar	Pemindahan Ibu Kota melalui Omnibus Law	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/37831
Surat kabar	Pemindahan Ibu Kota, DPR Batalkan Pembangunan Gedung	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/37248
Surat kabar	Pemindahan Perlu Revisi UU	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/36930
Surat kabar	PENANGANAN PANDEMI JADI FOKUS PEMERINTAH, PROYEK IKN BERPELUANG DITUNDA	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/11072
Surat kabar	Pengawal Lingkungan di Lokasi Baru Ibu Kota Negara	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10699
Surat kabar	Pertimbangkan Aspek Psikologis Warga Jakarta, DPR Belum Kompak soal Isu Pemindahan Ibukota	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/36813
Surat kabar	PROYEK INFRASTRUKTUR. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Tersambung Lokasi IKN	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/11486
Surat kabar	Senayan belum Satu Suara soal Wacana Pemindahan Ibukota	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/16671
Surat kabar	Soal Pemindahan Ibukota: DPR Minta Pemerintah Membuat UU Khusus	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/36989
Surat kabar	UU Pemindahan Ibu Kota Jangan Sampai Digugat	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/36933